

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arsyad, H. Jawade Hafids, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2007, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brioschi, Carlo Alberto, *Corruption: A Short History*, Brooking Institution Press, Washington D.C., 2017.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Girling, John, 1997, *Corruption, Capitalism, and Democracy*, Routledge, New York.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gottschalk, Peter, 2018, *Fraud Examiner in Private Investigation of White-Collar Crimes*, dalam buku *Fraud and Corruption*, Springer International Publishing AG, Cham Switzerland, hlm. 214.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Publishing, Malang.
- Ishak, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kasiyanto, Agus, 2020, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Jakarta

- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Fransiscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi dan Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Murad, Rumasdi, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurwanti, Yustina Hastrini, 2008, *Pemerintah Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.
- Salle, Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kombinasi Edisi 3*, Alfabeta, Bandung.
- Suhono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2022, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjondronegoro, Soedino M.P. dan Wiradi, Gunawan. 1983, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta.

Wilson, Ian Douglas, 2021, *POLITIK JATAH PREMAN Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, CV Marjin Kiri, Serpong.

B. Artikel Jurnal

Arsyad, Sanusi H.M., “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Modul Materi Tindak Pidana Korupsi”

Laksono, Fajar, dkk., “Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, 2011.

Newman, Nicholas, “Indonesia: Telling Lies”, *World Policy Journal*, Volume 28, Nomor 4, Winter, 2011.

Wafi, Abdul Rohim Al, “Nilai-Nilai Keislaman Dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Asy-Syari'ah*, Volume 21, Nomor 2, 2019.

Wibawa, Dhevy Setya, “Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif”, *Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, Volume 2, Nomor 1, 2021.

Wicaksono, Dian Agung, dkk., “Mendudukan Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 8, Nomor 6, 2011.

C. Hasil Penelitian

Akhmad Alwi, 2009, Peranan Hamengkubuwono IX Dalam Perjuangan Awal Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949), *Skripsi*, Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Ardheana Sella Regita Mustofa, 2018, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara PT. Multintes dan Desa Sendangsari di Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dinda Asilia, 2019, Pelaksanaan Kegiatan Ganti Kerugian Dalam pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bendungan Pidekso, Wonogiri, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ignatius Hernindio Dwiananto, 2020, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Irenne Yovita, Theedens, 2011, Pelaksanaan Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa di Desa Tegal Tirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ramadhana, Kurnia, dkk., 2021, Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021”, *Indonesia Corruption Watch*.

D. Artikel Internet

CNN Indonesia, INFOGRAFIS: Indeks Korupsi Indonesia Anjlok, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230201123809-15-907551/infografis-indeks-korupsi-indonesia-anjlok>, diakses pada 6 Maret 2023

Hukumonline, Bupati Nganjuk Tersangka: Kali Kedua KPK Gunakan Pasal 12 huruf i UU Tipikor, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bupati-nganjuk-tersangka--kali-kedua-kpk-gunakan-pasal-12-huruf-i-uu-tipikor-lt5846b51e8c191/>, diakses pada 11 Oktober 2023

Hukumonline, ini 4 Tahap Pengadaan Tanah dalam Permen ATR/BPN 19/2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-tahap-pengadaan-tanah-dalam-permen-atr-bpn-19-2021-lt6103ab27b87f8>, diakses pada 7 Maret 2023

Indonesia Corruption Watch, Jejak Korupsi di Pertanian, <https://antikorupsi.org/id/article/jejak-korupsi-di-pertanahan>, Diakses pada 7 Maret 2023, diakses pada 7 Maret 2023

Kompas, 6 Agenda Reformasi 1998, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/18/120000979/6-agenda-reformasi-1998?page=all>, diakses pada 6 Maret 2023

Kompas.com, Guru Besar FH UGM Sebut Pelayanan Pertanian Rawan Korupsi, ini Modusnya, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/16471481/guru->

[besar-fh-ugm-sebut-pelayanan-pertanahan-rawan-korupsi-ini-modusnya](#), diakses pada 7 Maret 2023

Putsanra, Dipta Videlia, Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton, <https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ>, diakses pada 4 April 2023.

Saor, Fernandes Rajo, Perolehan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://raja1987.blogspot.com/search?q=tanah-desa/>, diakses pada 24 April 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223)

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55)

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang
Perubahan Status tanah Bengkok dan yang sejenisnya Menjadi
Tanah Kas Desa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan
Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 35)

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa pada Desa
Caturtunggal, Kabupaten Sleman (Sedang Dalam Tahap Persidangan)